

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

Paparan data disini merupakan uraian tentang paparan data yang disajikan peneliti dengan topik yang sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan peneliti dan hasil analisa data. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam sub judul ini penulis akan menyajikan data yang telah diperoleh berdasarkan pada sumber penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Seperti mengenai monografi Desa yang berisi tentang bidang kemasyarakatan serta data-data yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab kepada beberapa masyarakat setempat mengenai Money Politic Dalam Pilkada Serentak 2018.

a. Profil Desa

Letak lokasi penelitian secara geografis Tiudan adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya Desa Tiudan terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas 3.184.02 km² atau 351,25 ha. Pusat

pemerintahan Desa Tiudan terletak di dusun Kleben RT 04 RW 07 dengan menempati areal lahan seluas 0,3 ha.

Jumlah penduduk Desa Tiudan sebanyak 8.847 jiwa yang tersebar di 6 Dusun, 12 RW dan 47 RT, dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 4.458 jiwa dan perempuan 4.389 jiwa. Tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 0,9% dengan tingkat kepadatan sebesar 278 jiwa/km².

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah keatas, terlihat dari banyaknya di halaman rumah masyarakat Tiudan terdapat tumpukan-tumpukan batu bata. Sebagian besar masyarakat Desa Tiudan mempunyai usaha membuat batu bata. Dari penghasilan menjual batu bata tersebut, bisa untuk menjamin kehidupan mereka dan bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat di Desa Tiudan ini sudah cukup baik. Rata-rata menempuh pendidikan menengah, bahkan ada yang menyelesaikan pendidikan hingga sarjana.¹

b. Sejarah Desa Tiudan

Desa Tiudan merupakan salah satu dari 20 Desa yang terletak wilayah administrasi Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Tiudan dahulu diawali oleh Trunojoyo, mempunyai sahabat dari arah barat dan berkumpul di Plenggrong. Trunojoyo adalah putra dari

¹ Hasil Observasi, di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung 5 Maret 2019

Cokroningrat (Raja dari Madura) yang maunya mencari kemerdekaan. Kemudian ada serangan dari Timur sungai dan Barat sungai, disitu ada Dusun Babatan sebagai tempat Payudan (Peperangan) yang mana dari wilayah Barat adalah dari prajurit Mataram sedangkan yang dari Timur adalah prajurit Trunojoyo, kemudian prajurit Trunojoyo terdesak hingga mundur sampai tiba di wilayah gunung kelud (Blitar).

Setelah Indonesia merdeka, Desa Tiudan telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:

- 1) Trimokarjo 1883 – 1895
- 2) H. Imam Asngari 1895 – 1940
- 3) Noto Sentono 1940 – 1975
- 4) M. Soekardi 1975 – 1989
- 5) Djoko Setijono 1990 – 1998
- 6) Asrori 1998 – 2013
- 7) Drs. Wajib Effendi 2013 – 2019

c. Wilayah

- 1) Batas Wilayah
 - a) Utara : Desa Pucangan, Desa Bolorejo
 - b) Timur : Desa Wonokromo
 - c) Selatan : Desa Mojoarum
 - d) Barat : Desa Keduncangkring
- 2) Wilayah Dusun
 - a) Dusun Siwalan

- b) Dusun Kudan
- c) Dusun Kleponan
- d) Dusun Kleben
- e) Dusun Krajan
- f) Dusun Plenggrong

3) Visi dan Misi

a) Visi

Tiudan berseri : Mewujudkan Desa Tiudan yang Bersih, Sehat, Elok, Religius dan Inovatif

b) Misi

- (1) Melaksanakan pembangunan insfratruktur di semua bidang dengan adil dan merata.
- (2) Meningkatkan sarana dan prasarana fisik serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan olah raga, utamanya prasarana fisik jalan, jembatan dan irigrasi.
- (3) Meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.
- (4) Meningkatkan peran koperasi agar benar-benar menjadi soko guru perekonomian desa, daerah dan nasional.
- (5) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang.
- (6) Memudahkan pelayanan masyarakat.
- (7) Menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi.

2. Money Politic Dalam Pilkada Serentak 2018 di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

Dalam setiap pesta demokrasi adanya money politic adalah hal yang harus wajib ada. Walaupun hal ini memang sebenarnya tidak dibenarkan dalam hukum positif maupun hukum Islam. Namun masyarakat tidak menghiraukan hal tersebut. Masyarakat lebih memandang realistik tidak memikirkan dampak apa yang kemudian bakal terjadi. Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat dan perangkat di Desa Tiudan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Muslihah, S.Pd selaku masyarakat di Desa Tiudan sekaligus Guru di SDN Wonkoromo 2 bahwa:

Penduduk merasa bahwa dalam pemilihan itu uang politik itu harus wajib ada, sebab ya saya harus meninggalkan pekerjaan untuk menyempatkan pergi ke tempat pemungutan suara, menurut saya antusias warga untuk memilih itu berkurang kalau tidak ada uangnya, jadi ya uang itu harus tetap ada, sekalipun itu hanya 10.000 dari pada tidak sama sekali. Saya sendiri menerima uang politik tersebut karena saya dikasih langsung uang tersebut jadi saya tidak enak mau menolaknya. Sebenarnya sih saya menyangkan pemilihan kepala daerah yang hanya 5 tahun sekali ini hak suara saya dapat dibeli begitu saja, Cuma ketika musim pesta demokrasi sayang kalau kita itu tidak menikmatinya. Dalam hati kecil saya sebenarnya takut untuk menerima money politic itu, tetapi saya sudah percaya dengan kader itu lebih lihai dalam mencuri-curi waktu dalam penyebaran uang, jadi saya merasa aman-aman saja.²

Kemudian disampaikan oleh bapak Gede Pamungkas selaku masyarakat di Desa Tiudan, bahwa:

² Wawancara dengan Ibu Siti Muslihah, Guru SDN Wonkromo 2, Tanggal 13 Maret 2019

Money politic itu terus terjadi sampai sekarang ini karena memang sudah menjadi kultur budaya bangsa Indonesia, tidak hanya di Desa Tiudan ini saja banyak sekali daerah-daerah lain masyarakatnya mau menerima uang politik, “Tradisi giyatu looooch, jadi ya tidak bisa di hilangkan secara frontal” Calon-calun kepala daerah tersebut menyebarkan uang kepada masyarakat ya memang untuk menarik simpati masyarakat dan meraih sesuatu yang di inginkan jadi ya harus menghalalkan segala cara. Saya sih tidak meminta uang politik tersebut tapi saya kan dikasih jadi ya saya terima saja, kalau tidak saya terima nanti tersinggung. Uang yang dikasih 10.000 dari calon kepala daerah pak Syahri Mulyo. Dan masyarakat secara umum tida berfikir dalam memilih itu harus pakai hati nurani, yang terpenting “lo jual gue beli” ibaratnya seperti itu. Dan saya tidak takut dalam menerima uang politik tersebut karena untuk membuktikannya itu sulit, harus ada bukti autentik dan akurat.³

Kemudian disampaikan oleh bapak M. Hadi Khanani, S.Pd selaku masyarakat di Desa Tiudan sekaligus ketua IPNU Gondang, bahwa:

Masyarakat awam berfikir bahwa politik itu harus ada uangnya, dan menurut saya politik uang ini sudah menjadi budaya dalam setiap pemilihan, sebetulnya tujuan paea calon-calun kepala daerah itu pasti baik, visi misi yang ingin diterapkan itu baik, cuma ya itu ambisi untuk menang hanya bermodal obral-obral janji itu saja tidak cukup untuk mendapatkan sebuah kemenangan, sehingga menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan tersebut. Uang yang saya terima 10.000, diberikan 1 hari sebelum hari pencoblosan. Saya ktidak takut untuk menerima uang politik tersebut, karena sebetulnya dari pengawas sendiri tidak tegas dalam menjalankan tugasnya, kemudian faktornya lagi kekeluargaan jadi bisa mengurangi keprofesionalitasan dari pengawas.⁴

Kemudian disampaikan oleh mbak Endang Sulistyو Rini selaku masyarakat di Desa Tiudan, bahwa:

Sekarang apa-apa serba uang dan zaman sekarang juga kalau tidak ada uang kebanyakan masyarakat tidak mau memilih, jadi ya uang itu harus wajib ada dalam setiap pemilihan umum. Dan saya pribadi tidak menyayangkan hak suara saya bisa di beli begitu saja, karna saya masyarakat pedesaan yang tidak memikirkan hal-hal rumit seperti

³ Wawancara dengan Bapak Gede Pamungkas, Tanggal 13 Maret 2019

⁴ Wawancara dengan Bapak Hadi, Ketua IPNU Gondang, Tanggal 13 Maret 2019

dampak apa yang akan timbul jika saya menerima uang politik tersebut dan saya juga tidak takut karena memang saya tidak mengerti mengenai sanksi apa yang diberikan jika ketahuan menerima uang tersebut. Intinya uang tersebut saya terima saja, saya mendapat 10.000 dari kadernya Syahri Mulyo, dan uang tersebut diberikan 1 hari sebelum hari pencoblosan. Saya juga mendapat uang 50.000 saat jaga keamanan acaranya Margiono khotbah politik di Masjid Al-Huda.⁵

Kemudian disampaikan oleh Ibu Mei Riana Wulandari selaku anggota

Badan Pengawas Desa di Balai Desa Tiudan, bahwa:

Saya pribadi lebih baik memilih dengan diberi uang daripada memilih secara murni, karena sebagai imbalan suara saya yang telah saya berikan dan sebagai ganti satu hari tidak masuk kerja. Dan saya tidak menyayangkan hak suara saya bisa dibeli karena orang kecil bisa apa, jadi ya uang tersebut saya terima dengan tangan terbuka. Saya sebenarnya punya rasa takut dalam menerima uang politik tersebut, tapi itu hanya rasa takut yang seketika saja, karena memang selama ini saya aman-aman saja setiap menerima uang politik dari pasangan calon kepala daerah. Selama ini saya menira bermacam-macam, saya pernah dapat 50.000, 30.000, 20.000 tapi untuk pemilihan kepala daerah di kabupaten tulungagung kemarin saya dapat 10.000 dari pak Syahri Mulyo.⁶

Kemudian disampaikan oleh mbak Ani Muhibah selaku masyarakat di

Desa Tiudan, bahwa:

Masyarakat awam memang membutuhkan uang tersebut, karena meskipun itu hanya 10.000 bagi masyarakat pedesaan uang tersebut sangat berarti, bisa buat beli lauk ataupun lainnya. Dan saya pribadi sih tidak setuju adanya money politik, tapi saya kalau menerima uang tersebut ya saya terima hehehe...menurut saya, uang itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari walaupun tidak seberapa tapi ya itu tetap penting. Sebenarnya saya menyayangkan hak suara saya bisa dibeli, tapi hasrat untuk menerima uang tersebut lebih besar daripada sekedar menyayangkan, kan cuma sekedar disuruh untuk mencoblos saja, jadi itu bukanlah sesuatu yang berat untuk dilakukan. saya juga tidak takut karena saya selama ini tidak tahu mengenai hukum yang mengatur hal

⁵ Wawancara dengan Ibu Endang Sulistyono Rini, Tanggal 20 Maret 2019

⁶ Wawancara dengan Ibu Mei Riana Wulandari, Anggota Badan Pengawas Desa Tiudan, Tanggal 20 Maret 2019

tersebut dan berakibat seperti apa. Saya kemarin waktu pemilihan calon kepala daerah dapat 10.000 dari bapak Syahri Mulyo.⁷

Kemudian disampaikan oleh mbak Iffana Chusnul Kotimah, S.Pd selaku masyarakat di Desa Tiudan, bahwa:

Di dunia ini tidak ada yang gratis mbak, disini sitemnya seperti simbiosis mutualisme (harus ada timbal balik) jadi ya namanya dia minta tolong ke kita ya harus ada uangnya dong, masak iya dia menyuruh saya untuk mencoblos tidak ada imbalannya, dan penting disini saya tidak meminta tetapi saya diberi jadi ya saya menerima dengan tangan terbuka, intinya uang politik tersebut wajib bagi saya. Tetapi saya pribadi mengenai urusan memilih ya tetap saya memilih sesuai keinginan saya, kalau perkara uang telah dikasih tadi ya itu kan namanya rezeky, rezeky bagi saya. Dan saya sebenarnya merasa takut dala menerima uang tersebut, Cuma ya waktu pemberian uang tersebut kan tidak kelihatan kalau itu uang politik, sudah kayak mengasih uang biasa saja. Biasanya pemberian uang disini itu timses dari paslon tersebut dikumpulkan terlebih dahulu, setelah selesai, disuruh mendata pemilih yang berpotensi untuk memilih calon tersebut dan biasanya dimintai foto copy KTP setelah itu uang akan cair satu hari sebelum hari pencoblosan. Uang yang saya terima kemarin 10.000 dari timses Syahri Mulyo.⁸

Kemudian saya bertanya kepada bu Atmisari selaku pengawas di Desa Tiudan, “mengapa bu sampai saat ini money politic itu terus terjadi, apakah masyarakat tidak mempunyai rasa takut ,mengingat ditingkat Desa itupun sudah ada pengawas?” lalu bu Atmi menjawab:

Money politic itu sudah mendarah daging di masyarakat sudah layaknya sebuah tradisi yang wajib ada saat pemilu, jadi tidak bisa di hilangkan begitu saja. Sebenarnya masyarakat itu mempunyai rasa takut dalam menerima money politic tersebut, akan tetapi hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, para tim sukses yang dalam memberikan uang tersebut sudah lihai. Kalau disuruh berkata bohong, pasti kebanyakan para pengawas itu jika di wawancara seperti ini akan berbicara kalau menemukan pelanggaran seperti money politic dimasyarakat pasti akan berkata akan di tindak lanjuti, akan diberikan

⁷ Wawancara dengan Ibu Ani Muhibba, Tanggal 20 Maret 2019

⁸ Wawancara dengan Ibu Iffana Chusnul Khotimah, Guru Les Primagama, Tanggal 25 Maret 2019

sanksi dan sebagainya. Tapi realitanya, “saya berkata secara realistis saja ya”, bahwa ketika seorang pengawas menemukan hal semacam itu di masyarakat akan dibiarkan saja, sistemnya kayak kekeluargaan, “ ah teman sendiri gakpapa lah” “ah tetangga sendiri gakpapa lah” pembahasannya semacam itu. Saya pribadi juga masyarakat biasa yang memang sudah mengetahui hal semacam money politic ini sudah lama, tidak mungkin akan saya mempersulit orang-orang disekitar saya si pemberi maupun si penerima ini. Padahal kalau dari segi hukum hal semacam ini kalau saya mau tindaklanjuti bisa, asal saya punya barang bukti yang valid, seperti foto ataupun video. Tetapi yasudah saya biarkan saja, karna masyarakat pedesaan itu berfikirnya setiap adanya pemilihan yang diharapkan hanya uang, “kalau tidak ada uang malas untuk mencoblos” mereka semua berhak ikut menikmati dalam pesta demokrasi ini.⁹

Kemudian saya bertanya kepada Bapak Budi Utomo selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat di Balai Desa Tiudan, “mengapa money politic itu terus terjadi sampai saat ini? apa masyarakat disini kebanyakan senang dengan adanya money politic? Dan apa masyarakat tidak merasa takut dalam menerima money politic tersebut?” lalu Pak Utomo menjawab:

Sebetulnya money politic itu tidak bisa dihapus, disini yang memulai itu bukan masyarakat melainkan para calon-calon yang mau memimpin, baik itu calon kepala daerah maupun calon legislatif. Para calon-calon ini melakukan hal seperti ini untuk apa, ya untuk mencari dukungan dengan merangkul, yang dirangkul itu adalah masyarakat. Para calon tersebut berusaha keras untuk memenuhi apa yang diinginkan masyarakat, mengingat permainan untuk memikat hati masyarakat itu banyak macamnya tidak hanya sebuah uang saja, ada pemberian seperti sembako, sumbangan uang untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Di masyarakat kecil kebanyakan pasti dalam sebuah pemilihan banyak yang menginginkan dan berkata, “masak tidak ada uang buat ngopi”, “ada uangnya nggak ini”, perkataan seperti ini sudah biasa kita dengar. Dan kenapa masyarakat itu tidak takut dalam menerima uang seperti ini, ya karena sudah terbiasa menerima uang seperti ini setiap pemilihan, dan mereka merasa aman-aman saja selama ini, jadi ya rasa takut itu tidak ada. Dari jaman dulu sampai sekarang belum ada di sini hal semacam ini dikasuskan. Dan menurut saya di dalam hal money politic jika tidak ada ketegasan

⁹ Wawancara dengan Ibu Atmisari, Pengawas Pemilu Desa Tiudan, Tanggal 25 Maret 2019

hukumnya dan uang yang di terima hanya kecil, para pengawas merasa malas untuk mengkasuskan perkara seperti ini, mengingat mengkasuskan di pengadilan itu juga terlalurumit sekali dan biayanya tidak sedikit, bahkan hakim pun mungkin juga akan malas dengan kasus kecil seperti ini, uang yang diberikan di masyarakat itu berapa sih, kan tidak banyak, hanya 10.000 – 20.000 saja. Faktor lain pengawas tidak mau mengkasuskan karena sistemnya kayak udah kekeluargaan seperti “temen sendiri”, “saudara sendiri”, “tetangga sendiri”, jadi ya sudah didiamkan saja. Dan di Desa Tiudan ini ada 31 TPS, rata-rata warga Tiudan sudah mengenal semua sama pengawas di Desa ini, jadi ya mana mungkin pengawas mau mengkasuskan.¹⁰

Dari wawancara diatas sudah jelas bahwa money politic selayaknya sebuah tradisi yang wajib ada dalam setiap pesta demokrasi dan tradisi semacam ini sulit untuk dihilangkan. Sebagian besar masyarakat Desa Tiudan tidak mempunyai rasa takut dalam menerima money politic tersebut. Mereka justru menerima uang politik tersebut dengan tangan terbuka dan tidak menyayangkan sama sekali hak suara mereka yang bisa dibeli begitu saja. Justru pelaksanaan Pilkada yang hanya dilaksanakan 5 tahun sekali ini yang membuat masyarakat juga ingin menikmati adanya money politic tersebut. Disisi lain tidak adanya ketegasan dari panitia pengawas pemilu untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran seperti money politic ini yang membuat orang-orang dalam melakukan money politic semakin meluas. Orang-orang yang melakukan money politic tersebut merasa aman, karena dengan pengawas tersebut sudah selayaknya kekeluargaan. Jadi meskipun pengawas tersebut mengetahui ada pelanggaran semacam money politic, maka pengawas lebih memilih untuk diam, karena yang melakukan tersebut dari kalangan tetangga sendiri, teman sendiri, dan bahkan keluarganya sendiri. Untuk membawa kasus semacam ini ke jalur hukum juga rumit, harus ada bukti yang jelas, biayanya juga tidak sedikit, jadi inilah yang membuat pengawas sering bersembunyi, abai, dan pura-pura tidak tahu. Meskipun hal semacam ini haram dalam agama Islam dan meskipun orang-orang mengetahui bahwa memberi ataupun menerima money politic itu dosa

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Budi Utomo, Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Tiudan, Tanggal 25 Maret 2019

besar, namun nafsu seseorang lebih tinggi untuk menerima uang politik tersebut daripada berfikir jernih dan menahan diri untuk tidak menerimanya.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan diatas, yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa :

1. Money politic terus terjadi sampai sekarang di Desa Tiudan karena memang sebenarnya money politic itu sudah mendarah daging di masyarakat, sudah layaknya sebuah tradisi dalam setiap pemilihan umum itu berlangsung. Namun hal semacam ini tidak hanya menjadi budaya di Desa Tiudan saja , melainkan di berbagai daerah manapun juga sudah biasa adanya politik uang dalam setiap pesta demokrasi. Karena pada dasarnya antusias masyarakat itu berkurang jika tidak ada uangnya. Masyarakat berfikir sekarang apa-apa serba uang, tidak ada yang gratis. Sistemnya seperti simbiosis mutualisme, harus ada timbal balik. Kalau disuruh untuk mencoblos harus ada uangnya terlebih dahulu. Sekalipun uang tersebut kecil nominalnya tapi namanya uang pasti tetap berharga bagi masyarakat pedesaan. Setidaknya tetap mendapat timbal balik karena hak suara mereka yang telah di beli. Dan mereka semua rata-rata tidak menyangkan hak suara mereka bisa dibeli begitu saja meskipun Pilkada ini hanya terjadi 5 tahun sekali. Justru menurut mereka Pilkada yang hanya 5 tahun sekali inilah maka masyarakat juga ingin menikmatinya, salah satunya ya menerima uang politik tersebut. Dan disisi lain masyarakat merasa bahwa hal

semacam ini tidak memberatkan mereka, masyarakat hanya disuruh untuk mencoblos saja, tidak melakukan hal-hal lain, ini merupakan hal yang sangat mudah. Jadi pada intinya tangan masyarakat akan terbuka lebar untuk menerima uang politik tersebut.

2. Berkaitan dengan hukum positif dalam money politic bahwa jika tidak ada ketegasan hukumnya dan uang yang diterima hanya kecil, Uang yang dikasihkan di masyarakat itu hanya berkisar 10.000 sampai 20.000 dalam pemilihan kepala daerah, maka inilah yang membuat pengawas itu malas untuk membawa perkara semacam ini ke jalur hukum. Karena mengkasuskan di Pengadilan itupun terlalu rumit dan biayanya juga tidak sedikit dan bahkan mungkin hakim juga malas mengurus kasus kecil semacam ini. Dan faktor lain mengapa pengawas tidak mau mengkasuskan hal semacam ini karna sistemnya sudah kayak kekeluargaan, seperti temen sendiri, saudara sendiri, tetangga sendiri, tidak mungkin pengawas akan mempersulit orang orang disekitarnya, baik si pemberi maupun si penerima ini. Padahal kalau dari segi hukum hal semacam ini kalau mau di tindaklanjuti bisa, asal punya barang bukti yang valid, seperti foto ataupun vidio. Tetapi lebih memilih dibiarkan saja, karna masyarakat pedesaan itu berfikirnya setiap adanya pemilihan yang diharapkan hanya uang, “kalau tidak ada uang malas untuk mencoblos”.
3. Berkaitan dengan hukum Islam mengenai money politic dalam Pilkada bahwa money politic itu memang di larang dalam agama Islam. Pemberian berupa uang atau lainnya untuk mempengaruhi atau menyelewengkan

keputusan yang obyektif hal itu merupakan risywah yaitu sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran dan menetapkan kebatilan. Dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan dibalik perilaku politik, sehingga dalam hal ini dapat memudahkan dalam pemisahan secara jelas antara pemberian yang bernuansa suap atau pemberian dalam arti sesungguhnya atau dalam nuansa bantuan. Dan pemberian apapun itu bentuknya mungkin dalam urusan duniawi pastinya untuk mempererat tali kasih sayang dan lain sebagainya, namun kalau urusan akhirat dikembalikan lagi kepada niat dan tujuan orang yang telah memberikan sesuatu tersebut, fitrah manusia yang pasti selalu ada kekhilafan.